

## DAFTAR PUSTAKA

### DARI BUKU :

- Abdul Halim. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.
- Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Chairil, Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta : Gava Media.
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ilyas, Wirawan B. dan Pandu Wicaksono. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indra Mahardika Putra. 2017. *Perpajakan*. Edisi : *Tax Amnesty*. Cetakan-1. Yogyakarta. Quadrant.
- Juli Ratnawati. 2016. *Dasar-dasar perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisi)*. Cetakan ke-2. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lukito, Penny, Kusumastuti, (2014), *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- \_\_\_\_\_. 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2011. “*Perpajakan Edisi Revisi*”. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pohan, Chairil Anwar, 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rakhmat, Jalaludin. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Resmi, Siti, (2011), *Perpajakan Teori Dan Kasus Empat*, Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak*. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Ulum, Ihyaul, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.  
Waluyo. 2009 . *Akuntansi Pajak* . Jakarta . Penerbit : Salemba Empat.

\_\_\_\_\_. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

\_\_\_\_\_. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

## **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004  
Tanggal 24 Februari 2004 tentang Teknik Transparansi dan  
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Bab III pasal tiga (3)  
tentang Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan

Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Bab III pasal empat (4)  
tentang Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan

Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Bab III pasal lima (5)  
tentang Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bab III pasal delapan (8)  
tentang Standar Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bab III pasal sepuluh (10)  
tentang Standar Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bab III pasal tujuh (7)  
tentang Standar Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 1 ayat (2) tentang  
Tata Cara Pemeriksaan

Undang-undang KUP Pasal 12 ayat (1) tentang Dasar Hukum *Self Assessment  
System*

Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (2) yang berlaku mulai 1 April  
2010

Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 17 Ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022

### **DARI JURNAL :**

Azizah Anti Aprilianti, Siska P, Yudawati dkk, 2018. Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013 - 2016). Jurnal Ekonomi. Majalaya. Vol 19 No. 1 (2017).

Fuadi, Oentara Arabella dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tax and Accounting Review, Vol 1. No 1. 2013

Ida Ayu Ivon Trisnayanti, I Ketut Jati, . (2015), *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 292-310

Mahaputri, N. N. T. dan Noviyari, N. 2016. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 17 Nomor 3. ISSN: 2321-2351.

Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal). Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 4.

Maulida, Cut Inayatul, Adnan. Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Banda Aceh. Vol.2 No.4 2017. Halaman 67-74.

Mispa, Sitti. (2019). "Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, Vol 4 No 1, Juni 2019.

Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 4 Nomor 2. Halaman 345-357. ISSN: 2303-8556.

## **WEBSITE**

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-aturan-baru-pph-dan-ppn-dalam-ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan/>

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5792175/tak-bayar-pajak-hingga-rp-26-m-dua-orang-korporasi-di-bekasi-jadi-tersangka/amp>

<https://daerah.sindonews.com/artikel/jabar/12221/satu-keluarga-setahun-tilap-insentif-ppn-rp98-miliar?showpage=all>

<https://news.detik.com/berita/d-5723405/pungut-ppn-rp-13-m-tapi-tak-disetor-bos-cengkeh-di-bali-ditangkap>